

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin, Zainal Zaid. 2002. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Anonim. 2012. *Tim Kajian Profil Sektor RIIL: Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran*. Jakarta.
- Anoraga, Pandji. 2010. *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*. Dunia Pustaka Jaya. Jakarta.
- Arie, Marthen. 2013. *Prinsip-Prinsip Hukum dalam Penanaman Modal*. Arus Timur. Makassar.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan edisi 5*. Yogyakarta: Bagian penerbit STIM YKPN
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. 2017. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. PT. Alumni. Bandung.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif (Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Deddy Ismatullah dan A. Sahid Gatara. 2007. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*. Pustaka Setia. Bandung.
- Harjono, Dhaniswara K. 2021. *Hukum Penanaman Modal (Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia. Jakarta.
- Hartono, Sunnaryati dan Albert Wijaya. 2002. *Ekonomi Pancasila Sistem Ekonomi Indonesia dan Hukum Ekonomi Pembangunan*. Prisma. 1981.

- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ilmar, Aminuddin. 2006. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Kharisma Putra Utama. Jakarta
- , 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. PT Kharisma Putra Utama. Jakarta.
- Imron, Ali. 2008. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia (Proses, Produk & Masa Depan)*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Islamy, M Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Joel S. Migdal. 1988. *Strong Societies and Weak States (State-Society Relations and State Capabilities in the Third World)*. Princenton University Press. New Jersey.
- Margono, Bambang. 2003. *Pembaharuan Perlindungan Hukum*. Inti Ilmu. Jakarta.
- Muhadjir, Noeng H. 2000. *Ilmu Pendidikan Dan Perubahan Sosial (Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif)*. Rare Sarakin. Yogyakarta.
- , 2003. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research*. Rare Sarakin. Yogyakarta.
- Rahmadi, Supancana Ida Bagus. 2006. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Rakhmawati, N. Rosyidah. 2003. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*. Bayumedia Pub. Jawa Timur.
- Sasmoko. 2004. *Metode Penelitian*. FKIP UKI dan PPS. Jakarta.
- Sawir, Muhammad. 2021. *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik*. Deepublish. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

- , 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Soemantri Sri, 1976, *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*, Aksara. Bandung.
- Sorajah, M. *The International Law on Foreign Investment*, Edisi Ketiga. New York: Cambridge University Press, 2010.
- Subarsono, Agustinus. 2006. *Analisis Kebijakan (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao. 2010. *Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Sukirno, Sadono. 2016. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Rajawali Pers. Depok.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sutama. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Kuntitaif, kualitatif, PTK, dan R&D*. Kartasura: Fairuz Media.
- Suwardi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Indah. Jakarta.
- Suyatna, Uyat. 2009. *Kebijakan Publik (Perumusan, Implementasi dan Evaluasi)*, Kencana Utama, Bandung.
- Syafi'e Inu Kencana. 2004. *Ilmu Pemerintahan dan Al-Quran (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara.
- Untung, Budi H. 2010. *Hukum Investasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Utama, Prabawa, 1991. *Pemerintah di Daerah*. Ind-Hill-Co. Jakarta.

Uzair Fausan dan Heru Prasetyo (Penerjemah). 2006. *A Theory of Justice*, terjemahan dari *A Theory of Justice* John Rawls. Pustaka Pelajar. Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan.**

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal Daerah

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Undang-Undang No. 12 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2944).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

## Sumber Lainnya

- Ahmad, R.U dkk. 2010. *Tim Penyusun Naskah Komperehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komperehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku VII: Keuangan, Perekonomian, Nasional, dan Kesejahteraan Sosial, Pemilihan Umum. Jurnal*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Algifari. 2002. *Ekonomi Mikro dan Kasus. Jurnal*. STIE YKPN, Yogyakarta
- Anggreini, Reni Ratna. 2020. *Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Mengengah (UMKM) Sektor Perkebunan dari Dominasi Kepemilikan Modal Asing di Indonesia*. Skripsi. Program Pascasarjana. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Arif Poetra Yunar. Agustus 2012. *Sejarah dan Profil Alfamart*. Blogspot. [Arifpoetryunar.blogspot.com/2012/06/sejarah-dan-profil-alfamart.html?m=1](http://Arifpoetryunar.blogspot.com/2012/06/sejarah-dan-profil-alfamart.html?m=1)
- Az, Nasution. 2002. *Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No.8/1999 – L.N.1999*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia No. 42.
- Desty W Rizky dan Alananto I Donant. 2018. *Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan pada Produk Kosmetik. Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Attahiriyah.
- Fitriani, Syarifah. 4 Januari 2019. *Pemkab Barru Tolak Izin Indomaret*. Koran Online. fajarNews. (<https://fajar.co.id/2019/01/04/pemkab-barru-tolak-izin-indomaret/>).
- M. Iqbal. 15 Agustus 2018. *Profil Perusahaan Indomaret*. Wordpress. <http://ibalaja36.wordpress.com/2012/10/20/profil-perusahaan-indomaret/>.
- Madin, Dzul Apal Mangun. 2016. *Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Program Sarjana. Universitas UIN Alauddin Makassar. Makassar.
- Nel, Arianty. 2006. *Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas*

*Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional.* Jurnal. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sumatera Utara.

POLITIKA, 2010, *Jurnal Ilmu Politik*, Program Studi Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Jurnal.Vol. 1, Nomor 2

Siti Rohani Saraswati dan Alhadiansyah. 2017. *Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret Dan Alfamart Terhadap Ukm dalam Kaitannya dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.* Laporan Penelitian. Universitas Tanjungpura. Pontianak.

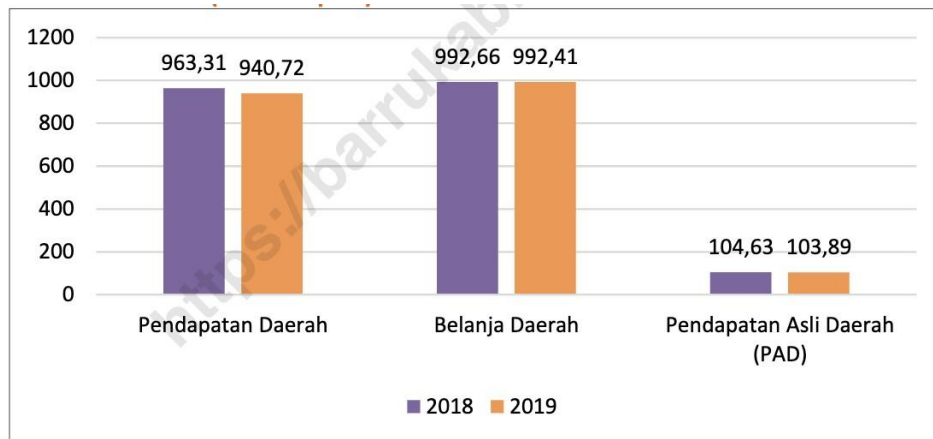
Tulus TH Tambunan, Dyah Nirmalawati dan Arus Akbar Silondae. 2004. *Kajian Persaingan dalam Industri Ritel.* Jurnal. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Wenny Cherrya. 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan.* Jurnal. STMIK GI MDP.

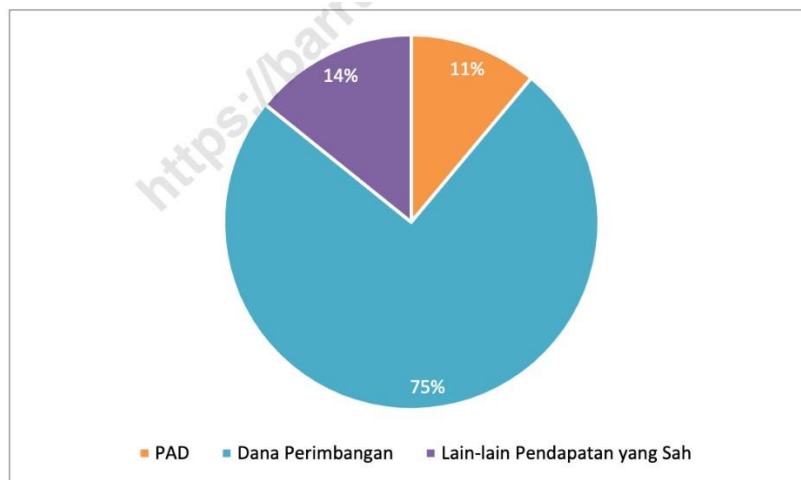
Witjaksono, Mit. 2009. *Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan.* JESP. Jurnal. JESP Vol. 1 Nomor 1

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru



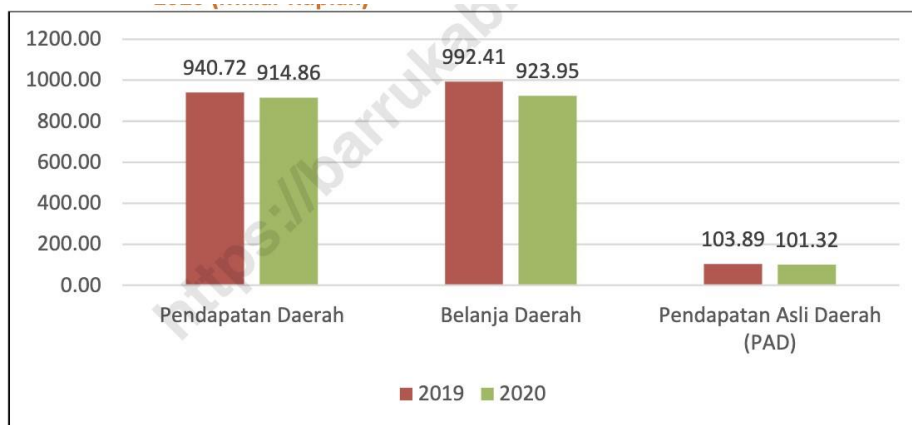
Sumber: Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Barru. Data diolah, BPS (2020)



Sumber: Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Barru. Data diolah, BPS (2020)

Jenis Penerimaan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>84,56</b>	<b>86,93</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>9,18</b>	<b>9,60</b>
1. Pajak Daerah	1,58	1,88
2. Retribusi Daerah	0,63	0,81
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,74	0,87
4. Lain-lain PAD yang Sah	6,24	6,03
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>64,43</b>	<b>64,99</b>
1. Bagi Hasil Pajak	0,89	0,74
2. Bagi Hasil Bukan Pajak	0,38	0,55
3. Dana Alokasi Umum	44,85	49,16
4. Dana Alokasi Khusus	18,30	14,54
<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>10,95</b>	<b>12,34</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>15,44</b>	<b>13,07</b>

Sumber: Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Barru. Data diolah, BPS (2020)



Sumber: Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Barru. Data diolah, BPS (2021)

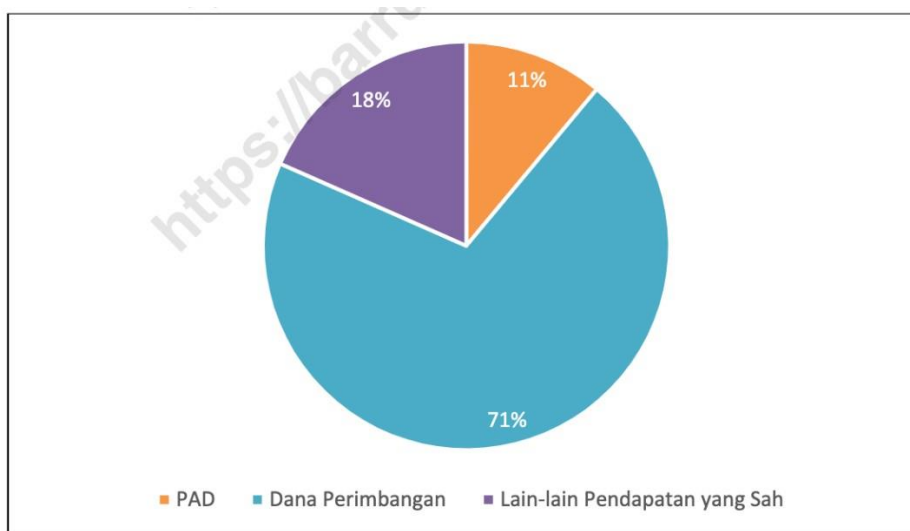
Rincian	Pertumbuhan	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Pendapatan Daerah	-2,34	-2,75
Belanja Daerah	-0,02	-6,90
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-0,71	-2,47

Sumber: Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Barru. Data diolah, BPS (2021)



Rincian	Tingkat Realisasi Anggaran	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Pendapatan Daerah	96,34	93,05
Belanja Daerah	98,10	90,99
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	94,43	89,41

Sumber: Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Barru. Data diolah, BPS (2021)



Sumber: Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Barru. Data diolah, BPS (2021)

## Lampiran 2. Daftar Pertanyaan

### Umum

1. Bagaimana bentuk kebijakan mengenai pelarangan pasar modern di Kabupaten Barru?
2. Kapan kebijakan tersebut berlaku
3. Bagaimana implementasi kebijakan pemberian izin terhadap pasar modern di kabupaten barru?
4. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam kebijakan pemberian izin tersebut?

5. Dengan adanya kebijakan mengenai pelarangan pemberian izin kepada pasar modern, lalu kenapa ada pasar modern yang dapat izin di kab. Barru?
6. Apa dampak kebijakan tersebut terhadap pemerintah, pemilik modal dan masyarakat?
7. pasar modern seperti apa yang dimaksud kebijakan tersebut
8. apa dampak APBD terhadap kebijakan tersebut?
9. Bagaimana pemerintah daerah melihat pasar modern atau swalayan tersebut?

#### **Pemilik pasar modern lokal/non lokal**

1. Sejak kapan pasar modern ada di kab. Barru (lokal)?
2. Apa mekanisme atau syarat yang diberikan pemerintah daerah kabupaten Barru kepada pelaku usaha pasar modern (lokal/non lokal)?

